

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,18%
	2	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	8 Desa
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa 		
IKU Strategis:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan 3. Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan 4. Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik 			
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,18%
	2	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	8 Desa
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	1. Meningkatnya Pelayanan Publik		
	IKU Strategis: 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,18%
	2	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	8 Desa
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 		
	IKU Strategis:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan 		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>I Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,18%
	2	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	8 Desa
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:		
	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	1. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan		
IKU Strategis:			
1. Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan			
Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Barat  <u>Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19770730 199802 1 001			

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,18%
	2	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	8 Desa
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:		
	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa		
IKU Strategis:			
1. Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik			
<p>Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	97,18
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Barang Milik Daerah 4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Terpeliharanya Barang Milik Daerah		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan 2. Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	Kegiatan: 1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Kegiatan: 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Kegiatan: 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Evaluasi RAPBDes
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p>Wayan Yusswara, S.STP..M.Si</p> <p>NIP. 19770730 199802 1 001</p>	

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	97,18
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Barang Milik Daerah 4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Terpeliharanya Barang Milik Daerah		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p>Wayan Yuswara, S.STP., M.Si</p> <p>NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	97,18
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan 2. Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p>Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si</p> <p>NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan
1		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
2		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	97,18
3		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
4		Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5		Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
6		Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	Kegiatan: 1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p>I Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si</p> <p>NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	97,18
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Kegiatan: 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p>  <p>I Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si NIP. 19770730 199802 1 001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	: 2026	
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029	
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan
	6	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p>I Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si NIP. 19770730 199802 1 001</p>		

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	: 2026	
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029	
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2025-2029	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2026)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan
	6	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan
Target	100%	97,18
100%	100%	100%
100%	100%	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p>1. Terlaksananya Evaluasi RAPBDes</p>	
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Camat Denpasar Barat</p>  <p>I Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si</p> <p>NIP. 19770730 199802 1 001</p>		

Formulir Kertas Kerja

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	: Kecamatan Denpasar Barat
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan									
	Sasaran: 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa	IKU Strategis: 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan 3. Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan 4. Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik								
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	Penurunan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	RSO.26.41.37.01	Camat	Kompetensi petugas yang belum memadai, SOP pelayanan tidak dijalankan secara konsisten, kurangnya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan	Eksternal	UC	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Kecamatan Denpasar Barat
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	RSO.26.41.37.02	Lurah	Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat akan manfaat program pemberdayaan	Eksternal	UC	Serapan anggaran rendah, program pemberdayaan tidak mencapai sasaran	Kecamatan Denpasar Barat dan Kelurahan
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya gangguan keamanan, ketertiban umum di masyarakat	RSO.26.41.37.03	Camat	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Eksternal	UC	Meningkatnya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Denpasar Barat
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Peningkatan Partisipan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan	RSO.26.41.37.04	Camat	Keterbatasan anggaran, kurangnya pelaksanaan sosialisasi	Internal	C	Realisasi kegiatan terhambat dan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi	Kecamatan Denpasar Barat

	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	Keterlambatan Penyampaian Laporan Pemerintahan Desa	RSO.26.41.37.05	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Perbekel	Kurangnya kedisiplinan administrasi dan manajemen waktu	Eksternal	UC	Terhambatnya proses monitoring oleh kecamatan	Kecamatan Denpasar Barat
--	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------	----	-----------------------------------------------	--------------------------

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Barat



I Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	: Kecamatan Denpasar Barat
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
Sasaran Strategis OPD	: 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Belum terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara maksimal dalam layanan kesekretariatan	ROO.26.41.37.01	Camat	Belum optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan	Internal	C	Program Tidak Terlaksana Dengan Baik	Kecamatan Denpasar Barat	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.41.37.02	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Sekcam	Jumlah gaji yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya	Eksternal	UC	Gaji dan tunjangan tidak dapat dibayarkan tepat waktu kepada pegawai yang bersangkutan	Kecamatan Denpasar Barat	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.26.41.37.03	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rasionalisasi anggaran yang cukup besar dalam proses perencanaan anggaran	Eksternal	UC	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal	Kecamatan Denpasar Barat	
		Tersedianya Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.26.41.37.04	Sekcam	Pembuatan RKBMD belum terlaksana sesuai kebutuhan karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Internal	C	Kebutuhan barang tidak terpenuhi	Kecamatan Denpasar Barat	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.26.41.37.05	Kasubag Umum & Kepegawaian	Keterlambatan Pengumpulan Absensi	Internal	C	Menurunnya Kinerja Tenaga Non ASN	Kecamatan Denpasar Barat	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.26.41.37.06	Sekcam	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Internal	C	Operasional Kantor Terhambat	Kecamatan Denpasar Barat	

		Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	Tidak komprehensifnya dokumen proposal yang diajukan sebagai usulan Musrenbang Kecamatan	ROO.26.41.37.07	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya pemahaman terhadap proses atau tahapan pelaksanaan musrenbang dan kurangnya pemahaman atas obyek usulan karena keterbatasan data dukung	Eksternal dan Internal	UC dan C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Kecamatan Denpasar Barat
		Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	Ketidakefektifan Pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat	ROO.26.41.37.08	Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kurangnya Penjelasan yang diberikan oleh Petugas Pelaksanaan Survey Terhadap Pengguna Layanan tentang Subjek/Objek yang diteliti	Eksternal	UC	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Kecamatan Denpasar Barat
		Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.26.41.37.09	Lurah	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Eksternal	UC	Program pemberdayaan tidak mencapai target dan anggaran kegiatan tidak terserap optimal	Kecamatan Denpasar Barat dan Kelurahan
		Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.26.41.37.10	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Eksternal	UC	Ketentraman dan ketertiban terganggu	Kecamatan Denpasar Barat
		Terlaksananya Peringatan Hari - Hari besar , Nasional dan Daerah	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar tidak berjalan secara maksimal	ROO.26.41.37.11	Kasi Pemerintahan	Kurangnya Antusias Masyarakat akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Eksternal	UC	Realisasi kegiatan terhambat dan tidak sesuai target atau anggaran	Kecamatan Denpasar Barat
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak optimal	ROO.26.41.37.12	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Minimnya jumlah SDM Kecamatan yang bisa difungsikan sebagai Tim Pembina dan kurangnya kompetensi SDM yang ditunjuk sebagai Tim Pembina	Internal dan Eksternal	C dan UC	Adanya desa yang belum tertib administrasi	Kecamatan Denpasar Barat
			Tidak komprehensifnya dokumen evaluasi APBDes	ROO.26.41.37.13	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya pemahaman Desa dan terjadinya persepsi yang berbeda terhadap aturan secara normatif	Eksternal	UC	Kekeliruan desa dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran	Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar, 31 Desember 2025

Camat Denpasar Barat



I Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar			
Tahun Penilaian		: 2026			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan			
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
1	Penurunan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	RSO.26.41.37.01	2	2	4
2	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	RSO.26.41.37.02	2	2	4
3	Meningkatnya gangguan keamanan, ketertiban umum di masyarakat	RSO.26.41.37.03	2	2	4
4	Informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan	RSO.26.41.37.04	2	2	4
5	Keterlambatan Penyampaian Laporan Pemerintahan Desa	RSO.26.41.37.05	2	2	4
III	Risiko Operasional OPD				
1	Belum terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara maksimal dalam layanan kesekretariatan	ROO.26.41.37.01	2	1	2
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.41.37.02	2	1	2
3	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.26.41.37.03	2	1	2
4	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.26.41.37.04	3	2	6
5	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.26.41.37.05	2	1	2
6	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.26.41.37.06	3	2	6
7	Tidak komprehensifnya dokumen proposal yang diajukan sebagai usulan Musrenbang Kecamatan	ROO.26.41.37.07	2	2	4
8	Ketidakefektifan Pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat	ROO.26.41.37.08	2	1	2
9	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.26.41.37.09	2	2	4
10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.26.41.37.10	2	2	4
11	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar tidak berjalan secara maksimal	ROO.26.41.37.11	2	2	4
12	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak optimal	ROO.26.41.37.12	2	2	4
13	Tidak komprehensifnya dokumen evaluasi APBDes	ROO.26.41.37.13	2	3	6

IV	Risiko Fraud OPD				
1	Mark-up Kebutuhan Barang/Peralatan Kantor	RF. 26.41.37.01	3	2	6
2	Mark-up Bukti Belanja atau Manipulasi Nota	RF. 26.41.37.02	2	1	2
3	Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	RF.26.41.37.03	2	1	2
4	Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.26.41.37.04	2	1	2
5	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban kepegawaian terkait gaji dan tunjangan	RF 26.41.37.05	2	1	2
6	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.06	2	1	2
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.37.07	2	1	2
8	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.08	2	1	2
9	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.26.41.37.09	3	2	6
10	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.10	2	1	2
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.37.11	2	1	2
12	Suap dalam proses pemeliharaan pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.12	2	1	2
13	Gratifikasi atas pemeliharaan barang dan jasa	RF.26.41.37.13	2	1	2
14	Potensi terjadinya penyimpangan integritas seperti suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam proses pelayanan publik.	RF.26.41.37.14	2	2	4
15	Manipulasi Data Output dan Kinerja	RF.26.41.37.15	2	2	4
16	Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF.26.41.37.16	2	2	4
17	Suap dalam proses pengadaan barang & jasa dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang	RF.26.41.37.17	2	1	2
18	Suap dalam proses pengadaan barang & jasa dalam pelaksanaan kegiatan PKK	RF.26.41.37.18	2	1	2

19	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	RF.26.41.37.19	2	1	2
20	Gratifikasi atas pemberian layanan	RF.26.41.37.20	2	2	4
21	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	RF.26.41.37.21	3	2	6
22	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF.26.41.37.22	2	2	4
23	adanya trading in influence dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan	RF.26.41.37.23	2	1	2
24	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terakit pemberdayaan kelurahan	RF.26.41.37.24	2	2	4
25	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan	RF.26.41.37.25	2	1	2
26	Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.26.41.37.26	2	2	4
27	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan	RF.26.41.37.27	2	1	2
28	Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.26.41.37.28	2	2	4
29	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dipilih dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan berdasarkan analisis kebutuhan, tetapi karena kedekatan dengan pihak tertentu	RF.26.41.37.29	2	2	4
30	Pemalsuan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RF.26.41.37.30	2	1	2
31	Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.26.41.37.31	2	2	4
32	Terdapat markup nilai pengadaan barang/jasa pada laporan pertanggungjawaban	RF.26.41.37.32	2	2	4
33	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF.26.41.37.33	2	1	2

34	Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.26.41.37.34	1	2	2
35	Perbuatan curang dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF.26.41.37.35	2	1	2
36	Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.26.41.37.36	1	2	2

Denpasar, 31 Desember 2025

Camat Denpasar Barat



Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
II	Risiko Strategis OPD					
II	Risiko Operasional OPD					

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Barat



I Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

Form 7
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
II	Risiko Strategis OPD						
II	Risiko Operasional OPD						

Denpasar, 31 Desember 2025
 Camat Denpasar Barat



I Wayan Yusswara, S.STP.,M.Si
 NIP. 19770730 199802 1 001

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Barat





Wayan Yuswara, S.STP.,M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2026					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Denpasar, 31 Desember 2025

Camat Denpasar Barat



I Wayan Yusswara, S.STP..M.Si

NIP. 19770730 199802 1 001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2026								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan								
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
II	Risiko Strategis OPD									
1	Penurunan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	RSO.26.41.37.01					- Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat - Perbaikan fasilitas ruang tunggu, sistem antrean, peralatan komputer dan jaringan internet untuk mendukung pelayanan - Memberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi/pelatihan kepada petugas yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya	sampai dengan Triwulan IV		
2	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	RSO.26.41.37.02					Melaksanakan Koordinasi dengan Lurah agar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Terlaksana Dengan Baik	sampai dengan Triwulan IV		
3	Meningkatnya gangguan keamanan, ketertiban umum di masyarakat	RSO.26.41.37.03					- Melaksanakan rapat koordinasi terkait Kententraman dan Ketertiban Umum - Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan bersama - Melakukan patroli dan monitoring dengan jadwal tetap dan laporan berkala	sampai dengan Triwulan IV		
4	Informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan	RSO.26.41.37.04					Sosialisasi yang lebih masif tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	sampai dengan Triwulan IV		
5	Keterlambatan Penyampaian Laporan Pemerintahan Desa	RSO.26.41.37.05					Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sesuai dengan Tupoksi Kecamatan	sampai dengan Triwulan IV		
III	Risiko Operasional OPD									
1	Belum terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara maksimal dalam layanan kesekretariatan	ROO.26.41.37.01					Melaksanakan Rapat Koordinasi di Kecamatan Denpasar Barat	sampai dengan Triwulan IV		

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.41.37.02					Mengkoordinasi agar penerimaan gaji pegawai yang mutasi agar masih menggunakan gaji dari tempat asal/tidak terputus, sampai dapat dianggarkan pada RKA TA selanjutnya.	sampai dengan Triwulan IV		
3	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.26.41.37.03					Menentukan Prioritas Anggaran	sampai dengan Triwulan IV		
4	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.26.41.37.04					Koordinasi antara seluruh pejabat dan petugas RKBMD terkait pengadaan dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan	sampai dengan Triwulan IV		
5	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.26.41.37.05					Melakukan koordinasi	sampai dengan Triwulan IV		
6	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.26.41.37.06					Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penggunaan Barng Milik Daerah	sampai dengan Triwulan IV		
7	Tidak komprehensifnya dokumen proposal yang diajukan sebagai usulan Musrenbang Kecamatan	ROO.26.41.37.07					Rapat Kordinasi Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota	sampai dengan Triwulan IV		
8	Ketidakefektifan Pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat	ROO.26.41.37.08					Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	sampai dengan Triwulan IV		
9	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.26.41.37.09					Melaksanakan Koordinasi dengan Lurah agar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Terlaksana Dengan Baik	sampai dengan Triwulan IV		
10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.26.41.37.10					Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	sampai dengan Triwulan IV		
11	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar tidak berjalan secara maksimal	ROO.26.41.37.11					1. Melakukan sosialisasi masif mengenai jadwal, tujuan, manfaat, dan mekanisme kegiatan. 2. Menentukan waktu dan lokasi kegiatan secara strategis, agar tidak mengganggu aktivitas peserta. 3. Memberikan panduan atau daftar persiapan (checklist) berisi dokumen, alat, atau data yang perlu disiapkan peserta sebelum kegiatan dimulai.	sampai dengan Triwulan IV		
12	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak optimal	ROO.26.41.37.12					Mengajukan usulan pengembangan kompetensi, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa	sampai dengan Triwulan IV		
13	Tidak komprehensifnya dokumen evaluasi APBDes	ROO.26.41.37.13					Melaksanakan Koordinasi terkait penyusunan APBDes dengan instansi terkait (DPMD, PD maupun PLD)	sampai dengan Triwulan IV		

IV	Risiko Fraud OPD								
1	Mark-up Kebutuhan Barang/Peralatan Kantor	RF. 26.41.37.01					- Penguatan peran Pengelola Barang/Aset dalam verifikasi RKBMD - Dilakukan perbandingan harga pasar dengan e-catalog - Verifikasi oleh pejabat berjenjang	sampai dengan Triwulan IV	
2	Mark-up Bukti Belanja atau Manipulasi Nota	RF. 26.41.37.02					Penerapan verifikasi keaslian bukti belanja (cross-check ke penyedia), Pelarangan penggunaan nota tidak resmi / nota edit digital	sampai dengan Triwulan IV	
3	Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	RF. 26.41.37.03					Melaksanakan rekonsiliasi gaji secara berkala	sampai dengan Triwulan IV	
4	Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF. 26.41.37.04					1. Adanya SOP yang mengatur tentang prosedur manajemen pegawai 2. Menyusun Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	sampai dengan Triwulan IV	
5	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban kepegawaian terkait gaji dan tunjangan	RF. 26.41.37.05					1. Adanya SOP yang mengatur tentang prosedur manajemen pegawai 2. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait tunjangan ASN	sampai dengan Triwulan IV	
6	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF. 26.41.37.06					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV	
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 26.41.37.07					Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	sampai dengan Triwulan IV	
8	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF. 26.41.37.08					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV	
9	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF. 26.41.37.09					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV	
10	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF. 26.41.37.10					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV	
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 26.41.37.11					Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	sampai dengan Triwulan IV	
12	Suap dalam proses pemeliharaan pengadaan barang & jasa	RF. 26.41.37.12					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV	
13	Gratifikasi atas pemeliharaan barang dan jasa	RF. 26.41.37.13					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV	
14	Potensi terjadinya penyimpangan integritas seperti suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam proses pelayanan publik.	RF. 26.41.37.14					Meningkatkan sistem pengawasan internal dan melaksanakan pelatihan/sosialisasi berkala tentang integritas dan anti-gratifikasi	sampai dengan Triwulan IV	
15	Manipulasi Data Output dan Kinerja	RF. 26.41.37.15					Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan validasi data hasil SKM sebelum finalisasi laporan	sampai dengan Triwulan IV	

16	Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF. 26.41.37.16					Rapat Kordinasi Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota	sampai dengan Triwulan IV		
17	Suap dalam proses pengadaan barang & jasa dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang	RF. 26.41.37.17					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
18	Suap dalam proses pengadaan barang & jasa dalam pelaksanaan kegiatan PKK	RF. 26.41.37.18					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
19	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	RF. 26.41.37.19					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
20	Gratifikasi atas pemberian layanan	RF. 26.41.37.20					Sosialisasi kepada petugas pelayanan tentang pengendalian gratifikasi	sampai dengan Triwulan IV		
21	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF. 26.41.37.21					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
22	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF. 26.41.37.22					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
23	adanya trading in influence dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF. 26.41.37.23					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
24	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terakit pemberdayaan kelurahan	RF. 26.41.37.24					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
25	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan Perkada	RF. 26.41.37.25					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
26	Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF. 26.41.37.26					Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	sampai dengan Triwulan IV		
27	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan Perkada	RF. 26.41.37.27					Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
28	Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF. 26.41.37.28					Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	sampai dengan Triwulan IV		
29	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dipilih dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan berdasarkan analisis kebutuhan, tetapi karena kedekatan dengan pihak tertentu	RF. 26.41.37.29					Penguatan transparansi dalam hal pemilihan kegiatan dan meminta saran atau masukan dari perwakilan dan tokoh masyarakat	sampai dengan Triwulan IV		

30	Pemalsuan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RF. 26.41.37.30				Setiap kegiatan wajib dilakukan dokumentasi, baik foto maupun video kegiatan	sampai dengan Triwulan IV		
31	Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF. 26.41.37.31				Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP, dan melakukan evaluasi setelah kegiatan	sampai dengan Triwulan IV		
32	Terdapat markup nilai pengadaan barang/jasa pada laporan pertanggungjawaban	RF. 26.41.37.32				Melaksanakan review terkait berkas pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa	sampai dengan Triwulan IV		
33	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF. 26.41.37.33				Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
34	Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF. 26.41.37.34				Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi khususnya di desa	sampai dengan Triwulan IV		
35	Perbuatan curang dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF. 26.41.37.35				Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	sampai dengan Triwulan IV		
36	Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF. 26.41.37.36				Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi khususnya di desa	sampai dengan Triwulan IV		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 31 Desember 2025

Samat Denpasar Barat



Wayan Yusswara, S.STP., M.Si

NIP. 19770730 199802 1 001